

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara, maka informasi keuangan Negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan informasi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 71 tahun 2010 ditambah lagi dengan terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 jo.Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memunculkan tuntutan mengenai perlunya pemahaman teoritis dan praktis pada akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah, sebagai kunci dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, relevan dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi keuangan daerah yang lemah menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkanpun

kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan pun kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (*Governmental Accounting Standards Board – GASB, Concepts Statement No.1*). Selain itu informasi laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis kurangpercayaan masyarakat terhadap pemda dengan adanya berbagai skandal keuangan. Laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Jika berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya, biaya transaksi yang tinggi dan pelayanan kepada publik yang buruk. Selanjutnya, berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan baik masyarakat, kreditur, dan investor internasional akan ragu menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban (*cost of money*) yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun kenyataannya, fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut. Hal ini berarti berbeda antara fenomena lapangan (kenyataan) dengan teori (harapan). Secara teoretis, informasi laporan keuangan yang baik, jika dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah oleh pengelola keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai standar akuntansi pemerintahan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Penelitian mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah dilakukan oleh Devi Roviyanti (2012), Emilda Ihsanti (2012) dan Nurillah (2014). Devi Roviyanti (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, demikian pula penelitian Emilda Ihsanti (2012) yang berjudul pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nurillah (2014) berjudul Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada pemerintah kota Depok yang menunjukkan pengaruh positif signifikan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti transparansi anggaran dan keuangan pemerintah daerah. Transparansi merupakan isu utama dalam pemerintahan yang

demokratis, pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan pemerintah daerah peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya publik yang berakibat pada pemborosan. Peningkatan transparansi publik dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik. Perhatian terhadap transparansi di Indonesia berkembang dengan dikeluarkannya Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam undang undang tersebut menyebutkan pemerintah berkewajiban menyebarkan informasi publik dengan cara mudah dijangkau masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami.

Transparansi anggaran dan keuangan pemerintah daerah kepada publik
Transparansi anggaran dan keuangan pemerintah daerah kepada publik tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai transparansi telah dilakukan oleh Sri ayu wulandari (2014), Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan studi pada pemerintah kabupaten pinrang yang hasilnya menunjukkan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. . Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitan Iskandar (2014) berjudul Pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan studi pada SKPD pemerintah

kabupaten bintang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan transparansi public terhadap akuntabilitas keuangan.

Pelaporan dan ketepatanwaktuan. Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparanbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat serta peran dari audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian mengenai Sistem pengendalian intern telah dilakukan oleh Udiyanti, Admaja dan Darmawan (2014) menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian

menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ada pengaruh positif signifikan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini madjha (2013) pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gorontalo utara, yang menunjukkan ada pengaruh signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Zuliarti (2012) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten kudus) dengan hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka motivasi dilakukannya penelitian ini adalah karena 1). masih adanya kesenjangan (research gap) pada penelitian sebelumnya; 2). Penelitian ini mengambil lokasi pada SKPD pemerintah kabupaten kotabaru karena Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2015 yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI, yang merupakan lompatan besar, mengingat hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan keuangan tahun

Anggaran 2010 , 2011 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian tahun anggaran 2012 mendapatkan opini tidak wajar dan tahun anggaran 2013, 2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta ketidak cukupan pengungkapan laporan keuangan (Pidato anggota BPK RI atas LHP Pemerintah kabupaten Kotabaru tahun 2012. <http://www.kotabaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2013>).

Motivasi-motivasi tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti, artinya bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan sistem pengendalian intern pemerintah mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010-2015

Tahun	Opini BPK RI
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Tidak Wajar (TW)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

(Sumber : www.kotabaru.bpk.go.id Tahun 2016)

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Sistem akuntansi keuangan daerah, Sistem Pengendalian intern , dan transparansi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru, Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan uraian diatas dan didukung dengan fakta fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “ **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Transparansi Publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**” (Penelitian pada SKPD Kabupaten Kotabaru)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan diteliti. Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat, masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih (Sangadji dan Sopiah, 2012).

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital, salah satu fungsinya ialah Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital, salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan *good government*, hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara professional. Berdasarkan latar belakang

masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menganalisis transparansi publik terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah
3. Menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam pembahasan tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, transparansi publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktek akuntansi di Indonesia dimasa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, transparansi publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.